

MPRA

Munich Personal RePEc Archive

Invest in Human Resource, Invest in Economy

Ngasuko, Tri Achya

15 March 2019

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98266/>
MPRA Paper No. 98266, posted 22 Jan 2020 14:17 UTC

Invest in Human Resource, Invest in Economy[¶]

Tri Achya Ngasuko^α

^α Center for Financial Sector Policy, Fiscal
Policy Agency, Ministry of Finance
Jakarta 10710, Indonesia

Correspondence

Tri Achya Ngasuko
Center for Financial Sector Policy, Fiscal
Policy Agency, Ministry of Finance,
Jakarta 10710, Indonesia

Email:

ngasuko@gmail.com

With the realization of massive infrastructure development in the last five years, including the disbursement of Village Funds of Rp 187 trillion since four years ago, it is time for the Government to re-navigate its development goals by elaborating development. Now, the Government focuses on developing Indonesia from "inside", namely in terms of Human Resources (HR). This brief review aims to see how the focus on the development of Indonesian HR in the future. This paper shows that one of the prerequisites for becoming a developed country is quality human resources. For Indonesia, the Human Development Index (HDI) of Indonesia in 2018 will reach 71.39. This figure increased by 0.58 points or grew 0.82 percent compared to 2017. This study also produced information that infrastructure development that has been carried out on a large scale in the last five years is an excellent solution to overcome the problem of the distribution of quality human resources in Indonesia. Infrastructure development will enhance good connections between regions in Indonesia to encourage equality between regions. Thus, the quality of existing human resources will not accumulate in one particular area. This study adds that the closest challenge is preparing the community as fully as possible for the presence of the industrial era 4.0. Responding to this natural phenomenon, Indonesians have to make themselves successfully passing this era.

Keywords: *human resource development, life quality, Indonesia*

JEL Code: I30, O15, J24

[¶] Most of the contents of this article have been published in the *Warta Fiskal 2nd Edition, 2019* with the same title.

Berinvestasi pada SDM, Berinvestasi pada Ekonomi[¶]

Tri Achya Ngasuko^α

^α Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta 10710, Indonesia

Korespondensi

Tri Achya Ngasuko

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta 10710, Indonesia

Email:

ngasuko@gmail.com

Dengan realisasi pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam lima tahun terakhir, termasuk pencairan Dana Desa sebesar Rp 187 triliun sejak empat tahun lalu, sudah saatnya bagi Pemerintah untuk menavigasi kembali tujuan pembangunannya dengan mengelaborasi pembangunan. Sekarang, Pemerintah fokus mengembangkan Indonesia dari "dalam", yaitu dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Tinjauan singkat ini bertujuan untuk melihat bagaimana fokus pengembangan SDM Indonesia di masa depan. Penelitian singkat ini menunjukkan bahwa salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2018 akan mencapai 71,39. Angka ini meningkat 0,58 poin atau tumbuh 0,82 persen dibandingkan 2017. Studi ini juga menghasilkan informasi bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam skala besar dalam lima tahun terakhir merupakan solusi yang sangat baik untuk mengatasi masalah distribusi kualitas manusia sumber daya di Indonesia. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan koneksi yang baik antar daerah di Indonesia untuk mendorong kesetaraan antar daerah. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia yang ada tidak akan menumpuk di satu area tertentu. Studi ini menambahkan bahwa tantangan terdekat adalah mempersiapkan masyarakat semaksimal mungkin untuk kehadiran era industri 4.0. Menanggapi fenomena alam ini, orang Indonesia harus berhasil melewati era ini.

Kata kunci: pembangunan sumber daya manusia, kualitas hidup, Indonesia

Kode JEL: I30, O15, J24

[¶] Sebagian besar isi artikel ini telah diterbitkan dalam *Warta Fiskal Edisi 2 Tahun 2019* dengan judul yang sama.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar dari kita tentu menyadari bahwa Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya membangun Indonesia dari sisi luar atau “fisik”-nya. Infrastruktur dan mobilitas berupa jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan banyak dibangun hingga di pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur adalah agenda pembangunan yang tidak bisa ditawar, sebab infrastruktur adalah persyaratan mendasar dalam berfungsinya negara mana pun. Listrik dibutuhkan untuk memberi daya pada rumah dan industri, jalan dibutuhkan sebagai prasyarat distribusi hasil produksi, begitupula pelabuhan dan bandara yang sangat dibutuhkan di era perdagangan global. Kurang baiknya kualitas infrastruktur, akan menyebabkan kemacetan dalam kelancaran fungsi ekonomi suatu negara.

Dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur yang masif dalam 5 tahun terakhir, termasuk dalam bentuk penggelontoran Dana Desa sebanyak Rp 187 triliun sejak empat tahun lalu, sudah selayaknya masyarakat mulai merasakan manfaatnya dengan peningkatan kualitas hidup sehari-hari demikian pula dari sisi kesejahteraan. Setelah itu semua dilakukan, saatnya kini Pemerintah melakukan navigasi ulang atas tujuan pembangunannya dengan mengelaborasi pembangunan. Saatnya Pemerintah fokus terhadap pembangunan Indonesia dari “dalam” yaitu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.

Penelitian singkat ini bertujuan untuk melihat bagaimana fokus pengembangan SDM Indonesia di masa depan.

II. METODE

Penulisan artikel singkat ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa penelitian, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang terkait dengan pembahasan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

APBN 2019 dan Komitmen mengenai SDM

Mungkin tidak banyak yang memperhatikan bahwa tagline APBN 2019 kita adalah “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Jangkar dari komitmen ini salah satunya adalah fakta bahwa negara kita akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030. Dengan struktur demografi demikian, Indonesia harus menyiapkan sejak dini agar bisa bersaing dengan negara lain.

Salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju adalah kualitas SDM yang mencukupi. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan dengan 2017. Pembangunan manusia di bidang pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagaimana tercermin dalam IPM ini. IPM mempunyai signifikansi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena mampu menekan tingkat kemiskinan manusia.

Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya mengapa baru di sekarang pembangunan SDM menjadi fokus. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar sebab upaya pengembangan SDM sudah menjadi agenda pembangunan sejak lama. Namun memang baru pada administrasi Pemerintahan tahun 2014-2019, agenda pembangunan terlihat sangat fokus kepada pembangunan infrastruktur. Meskipun “biaya” mengejar ketertinggalan di bidang ini tidak murah sebagaimana tercermin dari besarnya alokasi belanja APBN ke infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, harus diyakini bahwa di masa yang akan datang biaya ini akan berubah menjadi manfaat.

SDM sebagai Tenaga Kerja

Tersedianya SDM yang berkualitas merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. SDM yang baik terbentuk sejak bayi dalam kandungan. Pemerintah melalui beberapa program sudah meluncurkan program tertentu yang fokus terhadap masalah tersebut, termasuk masalah stunting yang sempat mengemuka beberapa saat yang terakhir. Kesehatan merupakan salah satu fokus dari “Nawacita” Presiden Jokowi pada tahun 2014 yang lalu. Salah satu dari Nawacita tersebut berbunyi “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program untuk mengejawantahkan Nawacita tersebut. Program Indonesia Sehat mempunyai sasaran untuk meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Selain Program Indonesia Sehat, terdapat pula program lainnya yang turut disinergikan seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar.

Terbentuknya SDM yang sehat secara jasmani setidaknya merupakan salah satu modal awal Indonesia untuk dalam menyambut persaingan global, di tengah bonus demografi yang

dialami Indonesia. Apalagi Indonesia digadang-gadang akan memiliki bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah SDM tersebut sudah siap untuk menyambut tantangan di era globalisasi. Di sisi lain, apa saja yang sudah Pemerintah siapkan agar masyarakat Indonesia meraih hasil optimal dari bonus demografi tersebut?

Pada Maret 2018, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan bahwa ada tiga isu utama dalam masalah SDM Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, kedua kuantitas, dan ketiga adalah persebaran SDM. Menurut pandangan penulis, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif dalam 5 tahun terakhir merupakan solusi yang baik untuk mengatasi masalah ketiga. Pembangunan infrastruktur meningkatkan koneksi yang baik antar daerah di Indonesia sehingga mendorong adanya kesetaraan antar daerah. Dengan begitu, SDM yang ada tidak akan menumpuk di satu titik daerah tertentu saja.

Solusi lain yang mungkin diambil adalah terkait wacana yang baru saja digaungkan yaitu memindahkan ibu kota negara. Jakarta adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Provinsi. Negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Myanmar telah lebih dulu melakukannya. Myanmar memindahkan ibu kotanya sejauh 320 Km di utara kota Rangoon (Yangon) pada 6 November 2005 ke Naypyida, dan Malaysia memindahkan ibu kotanya sejauh 25 kilometer dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Dengan segala keterbatasannya, Jakarta menawarkan sarana dan prasarana yang relatif lebih baik daripada daerah lain. Ditambah dengan peredaran uang yang konon mencapai 70 persen, sangat dimaklumi semua penduduk Indonesia berlomba dari penjuru Indonesia untuk migrasi ke Jakarta. Sayangnya, tidak semua talenta yang datang ke Jakarta mampu menggunakan potensi yang besar tersebut. Banyak juga

SDM kurang terdidik yang ikut mengadu nasib datang ke Jakarta. Hal ini semakin membebani ibukota Jakarta yang dengan permasalahan yang semakin kompleks.

Dua masalah SDM lainnya bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Dari sisi pendanaan, Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dana dalam APBN untuk dunia pendidikan sejak 2009. Dalam APBN 2019, anggaran di bidang pendidikan ini naik sebesar 13,2 persen dari 434,6 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 492,5 triliun rupiah pada tahun 2019. Angka ini terbagi menjadi tiga: 163,1 triliun rupiah melalui belanja pemerintah pusat, 308,4 triliun rupiah melalui transfer daerah dan dana desa, dan 21 triliun rupiah dalam bentuk pengeluaran pembiayaan³. Dengan alokasi sebanyak itu, berbagai indikator kesuksesan pembangunan SDM di masa yang akan datang diharapkan akan meningkat.

Sebagai tambahan, pemberian beasiswa untuk pendidikan formal merupakan cara “termudah” yang dapat diberikan oleh Pemerintah. Tentunya mereka yang terpilih harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk berkontribusi membangun Indonesia. Mereka kelak akan menjadi agen perubahan yang akan membuat wajah Indonesia menjadi lebih baik.

Selain pendidikan formal, pemerintah juga harus memperhatikan peningkatan pendidikan vokasi untuk menyiapkan SDM Indonesia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. Lebih lanjut, pemberian latihan kerja juga merupakan solusi untuk mendekatkan supply dan demand dari tenaga kerja. Saat ini, Pemerintah hanya memiliki 304 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia (William dan Lily Foundation, 2019). Angka ini sepertinya masih kurang menilik luasnya Indonesia dan banyaknya jumlah angkatan kerja di Indonesia. Apabila sepenuhnya mengandalkana APBN, Pemerintah tentunya akan menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah BLK di Indonesia ini. Namun tidak demikian halnya apabila teman-teman di sektor swasta juga dilibatkan. Salah satu keunggulan utama cara ini adalah fakta bahwa sektor swasta relatif lebih dekat kepada sisi demand tenaga kerja. Sebagai calon user para tenaga kerja, seharusnya mereka mampu mengarahkan penyelenggaraan calon tenaga kerja dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai imbalannya, Pemerintah juga layak untuk menawarkan berbagai kemudahan, misalnya dalam bentuk insentif pajak.

Tantangan ke Depan

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa. Tantangan paling dekat adalah menyiapkan seoptimal mungkin kepada para masyarakat akan kehadiran era industri 4.0. Revolusi industri merupakan proses yang sudah terjadi sejak lama dengan berbagai pemicu. Revolusi industri yang pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi industri kedua dipicu oleh mulai dikenalnya penggunaan lini industri dan listrik, revolusi ketiga dipicu oleh otomatisasi robot dan komputer, sedangkan revolusi industri keempat yang sedang kita hadapi ini dipicu dengan penetrasi internet dan pengolahan big data.

Manusia merupakan makhluk yang harus dapat merangsang adanya perubahan. Menyikapi fenomena natural ini, masyarakat Indonesia mau tak mau harus mempersiapkan diri untuk melalui era ini dengan baik. Sungguh mengerikan apabila masyarakat Indonesia gagal melaluinya. Keadaan yang lebih parah adalah apabila Indonesia tidak bisa melakukannya di saat struktur demografi yang masih mendukung. SDM Indonesia harus berhasil menangkap peluang sehingga akan meningkatkan penghasilan dan taraf hidupnya, sehingga tingkat kemiskinan nasional perlahan turut menurun. Hal ini penting, sebab kemiskinan merupakan akar dari munculnya masalah di negeri ini. Memang ada pameo di masyarakat bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi sesungguhnya apabila masyarakat memiliki penghasilan yang baik dan mampu membelanjakannya dengan benar, pastilah hidup yang berkualitas, dan akhirnya kebahagiaan, bisa diraih.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian singkat ini menunjukkan bahwa salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2018 akan mencapai 71,39. Angka ini meningkat 0,58 poin atau tumbuh 0,82 persen dibandingkan 2017. Studi ini juga menghasilkan informasi bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam skala besar dalam lima tahun terakhir merupakan solusi yang sangat baik untuk mengatasi masalah distribusi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan koneksi yang baik antar daerah di Indonesia untuk mendorong kesetaraan antar daerah. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia yang ada tidak akan menumpuk di satu area tertentu. Studi ini menambahkan bahwa tantangan terdekat adalah mempersiapkan masyarakat semaksimal mungkin untuk kehadiran era industri 4.0. Menanggapi fenomena alam ini, orang Indonesia harus berhasil melewati era ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Anggaran. (2019). *Informasi APBN 2019, ABPN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Bappenas. (2017). *Siaran Pers Bonus Demografi 2030-2040*. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses pada link : https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf
- Kemenkeu. (2018). *Tiga Isu Utama SDM Indonesia dalam Angkatan Kerja*. Kemenkeu. Diakses pada link : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tiga-isu-utama-sdm-indonesia-dalam-angkatan-kerja/>
- Lembaga Analisis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP). (2019). *Laporan Kajian Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (SMK dan BLK) di Sumba Barat Daya*. William & Lily Foundation. Diakses pada link: <http://wlf.or.id/webcms/images/website/382.pdf>